

2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA MUNTAI**

Jln R.A. Kartini No.1 Kec Muara Muntai Kab Kutai Kartanegara

RENJA AKHIR

**KEC MUARA MUNTAI
TAHUN 2025**

MUARA MUNTAI

Email : mmcamatoffice@yahoo.com
Kode Pos : 75562

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Akhir Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Muara Muntai dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

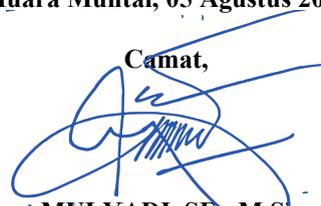
RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Muara Muntai untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapun keberhasilan dan tidak nya RENJA Perangkat Daerah ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada OPD Kecamatan Muara Muntai.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai tahun 2025 ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Muara Muntai dimasa yang akan datang.

Muara Muntai, 05 Agustus 2024

Camat,



MULYADI, SE., M.Si
NIP. 197002052000121003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA MUNTAI

Alamat Jalan RA. Kartini No. 001 – Kabupaten Kutai Kartanegara – KALTIM
Email : mmcamatoffice@yahoo.com MUARA MUNTAI Kode Pos 75562

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MUARA MUNTAI

Nomor : B.014/KEU-MM/900/03/2024

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 telah ditetapkan oleh Camat Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Bahwa Rancangan RENSTRA Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Muntai;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu Tim Penyusun RENJA Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat

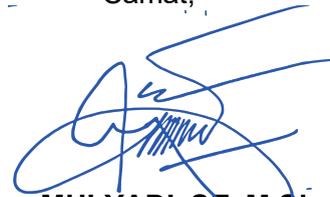
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-XX/BAPP/V/000.7.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Pertama : Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan RENJA Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Camat Kecamatan Muara Muntai.
- Ketiga : Menunjuk Aparatur Sipil Negri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 di Lingkungan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Muntai
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

Camat,



MULYADI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP197002052000121003

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Muara Muntai
Nomor : B.014/KEU-MM/900/03/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

**Nama Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
di Lingkungan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Mulyadi., SE.,Msi	Camat Muara Muntai	Penanggung Jawab
2	Ansarullah Roeslan, S.Pi	Sekretaris Camat	Ketua
3	M. Yusuf, S.Sos	Kasubag Penyusunan Prog dan Keu	Sekretaris
4	M. Irpan, Se	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
5	Wahyudi, S.Pi	Kasi Kesos	Anggota
6	Kuryadi, S.Hut	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	Akhmadi	Plt. Kasi Trantibum	Anggota
8	Erpina, SE	Kasubag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian	Anggota
9	Hartinah, SE	Pelaksana	Anggota
10	Yuniar	Pelaksana	Anggota

Camat,



MULYADI.,SE.,M.si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP197002052000121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK PENYUSUNAN RENJA 2025	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja PD	20
2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPDP	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
4.1. Program dan Kegiatan	53
BAB V PENUTUP	67



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Kecamatan Muara Muntai dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Muntai. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur



Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Muara Muntai mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Muntai, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD. Pada penyusunan Renja 2025 ini disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Muara Muntai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Muntai selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Muntai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Muara Muntai adalah:

- A. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :
1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
 2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
 3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
 4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
 11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
 12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.



C. Indikator Kinerja Utama

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah peserta musrenbang} \times 100}{100 \text{ Jumlah usulan dalam musrenbang}}$$

2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah Layanan} \times 100}{\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu}}$$

3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah Kelompok Siskamling Aktif} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan pos siskamling}}$$

4. Tingkat Capaian Pembangunan Untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan target pembangunan}}$$

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah



maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja Awal) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi “KUKAR IDAMAN”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan di tahun - tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Muara Muntai telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Lembar: 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2025)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	76 Nilai	75 Nilai	75 Nilai		76 Nilai	76 Nilai	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75 Dokumen	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	25 Dokumen	25 Dokumen	0,33
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	20 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1,00	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	50 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	15 Dokumen	15 Dokumen	0,30



7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	25 Rapat	15 Rapat	0 Rapat	0 Rapat	#DIV/0!	15 Rapat	15 Rapat	0,60
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	5 Dokumen	5 Dokumen	0,50
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran		75 Lapoaran	75 Lapoaran	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	57 Orang	54 Orang	44 Orang	44 Orang	1,00	54 Orang	54 Orang	0,95
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	1 Laporan	1 Laporan	1,00
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1,00	4 Dokumen	4 Dokumen	0,50
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00



7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	50 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	50 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	1,00	25 Laporan	25 Laporan	0,50
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	25 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00



7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Stel	15 Stel	0 Stel	0 Stel	#DIV/0!	15 Stel	15 Stel	0,32
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	#DIV/0!	0 Peraturan	0 Peraturan	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	#DIV/0!	0 Bimtek	0 Bimtek	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1,00	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	6 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	1,00	25 Porsi	25 Porsi	1,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Exemplar	5 Exemplar	0 Exemplar	0 Exemplar	#DIV/0!	5 Exemplar	5 Exemplar	1,00



7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	5 Jenis	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Kali	15 Kali	15 Kali	15 Kali	1,00	15 Kali	15 Kali	1,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	1,00	45 Laporan	45 Laporan	1,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	1,00	150 Dokumen	150 Dokumen	1,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	1,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	50 Unit	50 Unit	1,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1,00	8 Unit	8 Unit	1,00
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	2 Unit	2 Unit	0,50



7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	1,00	336 Rekening	336 Rekening	1,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	0 Jenis	0 Jenis	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit		2 Unit	2 Unit	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,08
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00



7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	33 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	#DIV/0!	0 Bidang	0 Bidang	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen		100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00



7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25 Kali	25 Kali	25 Kali	25 Kali		25 Kali	25 Kali	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan		36 Kegiatan	36 Kegiatan	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Kegiatan	29 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	1,00	29 Kegiatan	29 Kegiatan	0,81
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		20 Kegiatan	20 Kegiatan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	1,00	150 Orang	150 Orang	1,50



7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen		25 Persen	25 Persen	



7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*****)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	10 SPM	10 SPM	10 SPM	10 SPM		10 SPM	10 SPM	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00



7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	0 Desa	13 Desa	13 Desa		0 Desa	0 Desa	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00



7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Adanya Difisit Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Adanya Kegiatan yang salah penganggaran.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan;
2. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
3. Melakukan penyesuaian atas salah penganggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan SKPD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Muara Muntai, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Muara Muntai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat - surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Muntai selama kurun waktu tahun 2021 - 2022 cukup memuaskan. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

- a. Cakupan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
- b. Rata-rata Kinerja Kecamatan;
- c. Cakupan lembaga Masyarakat Yang Aktif;
- d. Presentase jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik;
- e. Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik;
- f. Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam.



Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, sebagai berikut:

T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Prosentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			75	80	85	95	75	0	85	90	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	0	100	100	
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Persentase Peningkatan kinerja dan tata kelola kecamatan			100	100	100	100	100	0	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.



Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Muntai dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
 - a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karenabelum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.
2. Permasalahan Eksternal:
 - a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
 - b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
 - c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desayang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan sertakeahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.JMS yang berlokasi di desa Muara Leka dan Desa Perian, Potensi Perikanan yaitu terdapatnya Danau Jantur dan Danau Melintang yang sebagian wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Muara Muntai.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Lembar : dari :

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				15.580.073.699	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.309.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	120.000.000	



7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	8 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	8 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	75.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	5.723.906.956	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	5.745.906.956	



7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	40 OB	5.635.731.014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	468 OB	5.635.731.014	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2023)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan	73.175.942	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan	85.175.942	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	28.256.100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	30.256.100	



7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	28.256.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	30.256.100	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	343.309.974	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	765.000.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	15.000.000	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan Camat
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	55.000.000	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.



7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	50.000.000	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	20.809.974	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	100.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Kali	20.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Kali	85.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	350.000.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	640.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	580.000.000	



7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	180.000.000	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Mebel	8 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Unit	-	Anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	634.029.904	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	638.529.904	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	7.500.000	



7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	334.852.192	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	334.852.192	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	560.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	430.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	55.000.000	



7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	50.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	500.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	125.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	12.650.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	12.650.000.000	



7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	1.550.000.000	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitas HUT RI 3. Fasilitas Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	11.100.000.000	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	75.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	830.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	830.000.000	



7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	55.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	775.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	285.520.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	570.520.000	



7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	285.520.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	570.520.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	306.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	200.520.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	214.520.000	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	50.000.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Muara Muntai dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Prioritas I, Prioritas II serta Rencana Pembangunan yang pembiayaannya dilakukan melalui CSR yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2024 di Kecamatan Muara Muntai:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Muara Muntai

NO	KAMUS USULAN	MASALAH	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Masih terputusnya/belum rampung jembatan ulin Jalan Gerbang Dayaku yang terletak di RT. 009	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Gerbang Dayaku RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1420707 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
2	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Tingkat kebisingan jalan yang masih tinggi dalam penggunaan papan kayu Ulin dan seringnya terjadi kerusakan lantai jembatan	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Gerbang Dayaku RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1425843 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati



							Nomor : 247/SK- BUP/HK/2021)
3	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Gang Pepaya masih menggunakan papan Kayu Ulin yang rentan rusak	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Gang Pepaya Jl. Jend. A. Yani RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1425974 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
4	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006 - RT. 007 masih kurang lebar dan masih menggunakan papan Kayu Ulin yang rentan rusak padahal termasuk akses ke kawasan sekolahan dan perkantoran	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006 - RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1425996 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
5	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Gang Kedondong sebagian belum disemenisasi , yang masih menggunakan papan Kayu Ulin yang rentan rusak	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Gang Kedondong Jl. Jend. A. Yani RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1426012 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)



6	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Jembatan yang berada di Jl. Dr. FI Tobing belum seluruhnya dilakukan peningkatan berupa semenisasi sehingga jembatan yang merupakan transportasi utama bagi pedagang untuk mengangkut barang dagangan serta merupakan transportasi utama untuk menuju ke Sekolah SMA, SMP, SDN 002, TK Gajah Mada dan Puskesmas Muara Muntai. Dengan kondisi tersebut, jembatan tersebut lebih memungkinkan cepat mengalami kerusakan seperti papan yang patah, licin saat hujan, suara yang berisik karena paku banyak lepas.	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. dr. FL. Tobing RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1423897 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
7	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Jembatan di RT 002 memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan RT 001 dan RT 003 yang mengapitnya sehingga pada saat banjir, jembatan bRT 002 akan lebih cepat tenggelam karena ketinggian jembatan < 1 meter, kondisi jembatan yang berisik karena paku longgar masyarakat terganggu suaranya, saat banjir, akses transportasi masyarakat RT 002 menjadi lebih sulit terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pedagang keliling tidak akan lewat di RT 002.	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 002 Muara Muntai Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1423953 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)



8	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Muntai	Desa Muara Muntai Ilir belum memiliki Tempat Pendidikan Alquran (TPA) untuk aktifitas mengajar Alquran sehingga anak-anak yang ingin mengaji harus pergi ke Desa lain. Kendala ini membuat para orang tua memiliki kekawatiran pada anak-anak karena harus bersepeda sejauh >1 KM untuk menuju TPA di desa lain.	Pembangunan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) JL. dr. FL. Tobing RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1424587 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	jalan jembatan di desa muara muntai ilir khususnya jl. gajah mada RT 002 menuju ke jalan jl. dr. FL tobing belum ada, sehingga rumah yang terdapat di lokasi tersebut sulit untuk beraktifitas terutama saat musim hujan atau banjir. dengan adanya pembangunan jalan di tempat tersebut dapat meningkatkan nilai jual tanah sekitar.	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429998 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
10	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum ada penghubung jalur 2 antara rt.05 dan rt.06	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan : pangeran hidayatullah rt.05 desa pulau harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Pulau Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1434003 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
11	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Jalur 2 belum tersedia lampu listrik	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU) Jalan: Pangeran Hidayatullah rt.01 desa pulau harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Pulau Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1434193 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor :



							247/SK-BUP/HK/2021)
12	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum ada jembatan menuju tempat tempat pembuangan akhir	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan : Pangeran Hidayatullah rt.06 desa palau harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Pulau Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1434225 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
13	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Semenisasi Jalan Desa Batuq Ke Desa Rabak RInding. 5 , 7 Km Mengingat Jalan Tersebut sangat di butuh bagi warga untuk menjaul hasil kebun.sementara jalan jalan tersebut sudah sangat tidak memedai . di karenakan jalan tersebut banyak lubang	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq Rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429723 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
14	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja	lanjutan pembangunan jalan ulin tambak dua 5 Km	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429965 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
15	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan Lapangan Putsal Dan Lapangan Voli Permanen 25 x 50 M	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu Desa Batuq Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432810 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui



							SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
16	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tabang	Pembangunan Jalan jembatan gang Ke tambak Dua 2 x 200 M	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq rt 03 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432857 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kota Bangun	Lanjutan Pembuatan Jalan Tembok desa Batuq Ke Kampung Loa Deras .5 Km	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq Rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432940 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Anggana	semenisasi jalan jembatan ulin di pemukiman Rt 04 Rt 05 . 4 x 400 M	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq rt 04 rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432967 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
19	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Belum Adanya Lampu Penerangan di 3 Jalan Desa Kayu Batu (Jl. Dewi Sartika, Jl. dr. Nazir, dan Jl. Bahrudin)	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU) Jl. dr. Nazir RT. 03 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430692 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor :



							247/SK-BUP/HK/2021)
20	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Muntai	Belum Ada Jaringan Pipa Air PDAM Dari Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Ke Paundana RT. 07 Desa Kayu Batu	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Muntai Puandana RT.07 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1431915 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
21	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	beberapa bagian jalan rusak dan terendam saat banjir. kondisi jembatan di jalan bahrudin rusak berat tidak bisa dilewati kendaraan dengan beban berat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Bahrudin Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432168 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
22	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Pelebaran dan Semenisasi Jalan Dewi Sartika mengingat kondisi jalan sempit dan sering mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan polusi suara, karena ketika di lintasi kendaraan bermotor jembatan mengeluarkan bunyi yang berisik sehingga mengganggu aktivitas warga.	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Dewi Sartika Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432483 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
23	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Peningkatan, Pelebaran dan Semenisasi Jalan Dr. Nazir mengingat kondisi jalan sempit dan sering mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan polusi suara, karena ketika di lintasi kendaraan bermotor jembatan mengeluarkan bunyi yang berisik	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. dr. Nazir Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432765 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor :



		sehingga mengganggu aktivitas warga.					247/SK-BUP/HK/2021)
24	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Pembangunan Pagar Kuburan Desa Kayu Batu, Pagar Sebelumnya Sudah Banyak Yang Rusak dan Lapuk.	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. dr. Nazir RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1433294 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
25	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan, Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Pembangunan Akses Jalan Pendidikan Di SDN 012 Desa Kayu Batu Belum Ada Peningkatan dan Kondisi Jalan Sempit.	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan, Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Jl. dr. Nazir 04 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1433821 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
26	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Merupakan sarana penghubung / Jalan antar gang- gang jalur 4 RT 08 Di Desa Muara Leka (Dusun Leka) sepanjang 400 meter dgn lebar 4 meter	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka (Dusun Leka 1) RT 08 Jalur 4 Kecamatan Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1433329 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
27	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	lanjutan semenisasi jalan RT 07 , sebagai akses jalan warga dusun Leka 1 dan memperlancar kegiatan perekonomian	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka (Dusun Leka 1) RT 07 Jalur 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1435543



		warga					(Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
28	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Sebagai Akses Transportasi untuk mengangkut hasil bumi sebagai penunjang perekonomian warga	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka RT 03 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1435720 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
29	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	adanya lanjutan semenisasi jalur 3 RT 06 Di Desa Muara Leka (Dusun Leka 2) sepanjang 200m x 4 m yang merupakan akses jalan warga untuk membawa hasil tani yang menunjang perekonomian warga	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa MUara Leka (Dusun Leka 2) Jalur 3, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1436040 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
30	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Muntai	rawan kecelakaan akibat jalan gelap saat malam hari terhadap warga melewati lintas dusun sehingga mengharapkn adanya penerangan lampu jalan	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU) Desa Muara Ieka (Dusun Leka 1), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1436228 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
31	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	merupakan jalan lintas penghubung antara Rt 02 dan RT 03 membawa hasil panen atau hasil bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka (Rt 02 dan Rt 03), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1436432 (Usulan sudah sesuai dengan



							pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
32	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Kecamatan Muara Muntai	Karna Kurangnya Tugu Penahan Napung/Gulma Yang Berada Di Danau/Sungai Di Desa Muara Aloh	Pembangunan Turap Danau/Sungai Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Aloh	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1428321 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
33	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Muntai	Masih Kurangnya Bak Penampung Air Bersih, Air Bersih Yang Di Salurkan Ke Warga Desa Muara Aloh	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Aloh	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1428389 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
34	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Karena Tidak Adanya Jembatan Penyebrangan Sangat Menyusahkan Warga Beraktifitas	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Aloh Rt 02 Menuju Rt 06, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Aloh	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430938 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
35	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Tidak adanya gedung posyandu Bunga Rampai 2 di RT.8 dan 9	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu Jalan Kampung Lama RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429293 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan



							Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
36	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Muntai	Tidak adanya Turap Menahan Gulma yang sangat diperlukan ketika ada bencana datang	Pembangunan Turap Jalan Kampung Lama RT.08 dan 09, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429713 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
37	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Tidak Selesai nya Pembangunan Jalan Jembatan tersebut sehingga tidak bisa di lewati oleh warga setempat	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan Kampung Lama RT.10.11 dan 12, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430433 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
38	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	TIDAK TERHUBUNGNYA JALAN JEMABATAN ANTAR RT.005 SAMPAI RT.007 DI DESA JANTUR SELATAN MEMBUAT KURANGNYA AKSES JALAN ANTAR RT DI DESA JANTUR SELATAN, KECAMATAN MUARA MUNTAI, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.	Pembangunan Jalan Lingkungan JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.005 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGA., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Selatan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430013 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
39	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	TIDAK TERHUBUNGNYA JALAN JEMABATAN ANTAR RT.006 SAMPAI RT.007 DI DESA JANTUR SELATAN MEMBUAT KURANGNYA AKSES JALAN ANTAR RT DI	Pembangunan Jalan Lingkungan JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.006 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGAR, Kab. Kutai	Desa Jantur Selatan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430249 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada



		DESA JANTUR SELATAN, KECAMATAN MUARA MUNTAI, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.	Kartanegara				Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
40	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	TIDAK ADA AKSES JALAN MENUJU RUMAH WARGA DI RT.012 DI DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.	Pembangunan Jalan Lingkungan JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.012 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Selatan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430348 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
41	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Muara Muntai	di rebaq rinding setiap warga masih melakukan buang sampah di sembarang tempat bahkan ban yak yang membuang sampah ke sungai di karenakan tidak ada tempat pembuangan sampah di desa ini, sehingga penting adanya tempat pembuangan sampah agar warga bisa melakukan kebersihan lingkungan secara teratur	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Jl. kh agus salim rt.05 Desa rebaq Rinding, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
42	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya pembangunan jalan alternatif di desa Rebaq Rinding yang selama ini hanya berporos 1 jalur	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl KH AGus Salim RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
43	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Pelebaran Jalan dari 4 ke 6 Meter sangat diperlukan di iringi padatnya kendaraan lalu lalang pada jalan desa	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan JL KH AGUS SALIM RT 3, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-



							03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
44	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya semenisasi jalan untuk mencegah kerusakan pada papan jalan ulin	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl KH AGUS SALIM RT 3, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
45	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pembangunan Jalan Beton Poros di tembokan Desa	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Rebaq Rinding RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
46	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Peninggian Jalan dikarenakan adanya Banir yang mengenai jalan poros di jalan tersebut	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
47	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Peninggian Jalan dikarenakan adanya Banir yang mengenai jalan poros di jalan tersebut	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah



							sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
48	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pelebaran Jalan menjadi 6 M Jalan dikarenakan intensitas jalan sering dilalui kendaraan roda empat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
49	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pelebaran Jalan menjadi 6 M Jalan dikarenakan intensitas jalan sering dilalui kendaraan roda empat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
50	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA GEDUNG SEKRETARIAT PENYULUH KB DI KECAMATAN MUARA MUNTAI	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi RT 4 REBAQ RINDING, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
51	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Semenisan Jalan Desa yang dimana mudah rusak disebabkan intensitas kendaraan roda 4 yang selalu lewat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 4, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan



							kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
52	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Semenisasi Jalan Desa yang dimana mudah rusak disebabkan intensitas kendaraan roda 4 yang selalu lewat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 5, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
53	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	JALAN POROS ANTARA DESA BATUQ DAN REBAQ RINDING SANGATLAH PENTING, DIKARENAKAN AKTIFITAS LALU LINTAS MASYRAKAT SANGAT BANYAK DAN RAMAI,.. SEHINGGA SANGAT PERLU UNTUK DILAKUKAN PEMELIHARAAN	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan JL. K.H AGUS SALIM RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 09-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
54	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin menuju pelabuhan RT.001 Desa Tanjung Batuq Harapan	Pembangunan Jalan Lingkungan Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
55	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Transportasi jalan sudah tidak memadai dengan keadaan mobilitas penduduk yang menggunakan roda dua dan roda empat sehingga menyebabkan kerusakan pada badan jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada



							Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
56	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Muntai	untuk mengurangi dampak erosi di dataran rendah yang menyebabkan kerugian materil kepada nelayan budidaya dan nelayan tangkap didesa Tanjung Batuq Harapan	Pembangunan Turap Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
57	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN DI DESA	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
58	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pembangunan Jalan Nusa Indah untuk membantu para petani	Pembangunan Jalan Lingkungan JL NUSA INDAH PERIAN, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
59	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA JALAN MENUJU AKSES WISATA DESA	Pembangunan Jalan Lingkungan KM 23 DESA PERIAN, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan



							Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
60	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA PEMBANGUNAN TPA DI RT 8 KARENA UNTUK MENJANGKAU RT 10, 7 DAN 5	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) RT 8 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
61	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Muntai	PERLINYA GEDUNG SEKRETARIAT ORGANISASI BUDAYA INDU ANJAT YANG TELAH LAMA TIDAK MEMILIKI GEDUNG SEKRETARIAT	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi RT 8, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
62	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Untuk menambah pengetahuan masyarakat si bidang pertukangan beton	Drainase jalan Lingkungan Desa perian, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 09-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
63	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Belum Terpenuhinya Semua Terbangun Jalan Jembatan di wilayah Tersebut	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Jl. Kampung Baru RT.01 Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Baru	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui



							SK Bupati Nomor : 247/SK- BUP/HK/2021)
64	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan konstruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlu Adanya Bantuan Dana Dalam Pembebasan Lahan Sehingga Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Antara Desa Jantur Baru dan Desa Jantur Selatan	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Baru	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 10-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)



BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Rencana Kerja 2025 merupakan bagian dari pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi. agar tujuan dan sasaran bisa tercapai dibawah ini disajikan rumusan tabel tujuan dan sasaran beserta permasalahan yang terjadi pada Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 2025

NO	URAIAN			
	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran
1	Belum optimalnya tertib administrasi di Kecamatan	Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap Tugas Pokok	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
		Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas		
2	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat		
3	Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparaturnya desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.		
		Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah		
4	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN		
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP		
5	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan		
		Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah		
		Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparaturnya desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial		
6	Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparaturnya kecamatan		
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku		
		Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparaturnya kecamatan		



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan – kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:



Tabel T-C.33.(koreksi sesuai dengan table 32
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				15.580.073.699				24.761.015.248
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Muara Muntai	76 Nilai	9.696.015.248	APBD Kutai Kartanegara		76 Nilai	10.096.015.248
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	5 Dokumen	120.000.000	APBD Kutai Kartanegara		5 Dokumen	75.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	25 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	25 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Muara Muntai	20 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	20 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	20 Dokumen	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	20 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Muara Muntai	15 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	15 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Muara Muntai	15 Rapat	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	15 Rapat	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	5 Dokumen	75.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	5 Dokumen	50.000.000



7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen		APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Muara Muntai	75 Lapoaran	5.745.906.956	APBD Kutai Kartanegara		75 Lapoaran	5.723.906.956
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Muara Muntai	468 OB	5.635.731.014	APBD Kutai Kartanegara	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2023)	54 Orang	5.635.731.014
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	1 Laporan	25.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	1 Laporan	15.000.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kali	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Muara Muntai	4 Dokumen	85.175.942	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	4 Dokumen	73.175.942
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-



7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Muara Muntai	50 Dokumen	30.256.100	APBD Kutai Kartanegara		50 Dokumen	28.256.100
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Muara Muntai	25 Laporan	30.256.100	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	25 Laporan	28.256.100
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	11 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		11 Dokumen	-
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-



7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Muara Muntai	47 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	47 Laporan	30.000.000
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Unit	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Muntai	15 Stel	-	APBD Kutai Kartanegara	15 Stel	30.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Laporan	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Laporan	-
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Laporan	-
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Peraturan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Peraturan	-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Bimtek	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Bimtek	-



7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Muara Muntai	8 Layanan	765.000.000	APBD Kutai Kartanegara		8 Layanan	343.309.974
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	5 Jenis	15.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan Camat	5 Jenis	7.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	6 Jenis	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	6 Jenis	35.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	6 Jenis	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan	6 Jenis	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	25 Porsi	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	25 Porsi	20.809.974
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Muntai	5 Jenis	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	5 Jenis	10.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Muntai	5 Exemplar	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Exemplar	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Muara Muntai	5 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Jenis	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Muara Muntai	15 Kali	85.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	15 Kali	20.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	45 Laporan	350.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	45 Laporan	200.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	150 Dokumen	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-



7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Muara Muntai	15 Unit	580.000.000	APBD Kutai Kartanegara		15 Unit	640.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	1 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		1 Unit	180.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	0 Unit	180.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	0 Unit	-
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Muara Muntai	50 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		50 Unit	60.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	8 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	8 Unit	200.000.000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	2 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Unit	200.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Muara Muntai	12 Bulan	638.529.904	APBD Kutai Kartanegara		12 Bulan	634.029.904
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	1000 Matrai	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1000 Matrai	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	336 Rekening	296.177.712	APBD Kutai Kartanegara	0	336 Rekening	296.177.712
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	0 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Jenis	-



7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	204 Org/Bulan	334.852.192	APBD Kutai Kartanegara	0	204 Org/Bulan	334.852.192
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Muara Muntai	2 Unit	430.000.000	APBD Kutai Kartanegara		2 Unit	560.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	0 Unit	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	0 Unit	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	1 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Unit	60.000.000
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	1 Unit	125.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Unit	500.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-



7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Muara Muntai	0 Bidang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Bidang	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen 88,5 Persen	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara	100 Persen 88,5 Persen	12.650.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	5 Kegiatan	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	10 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	10 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	25 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara	25 Kali	-



7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kali	-
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	36 Kegiatan	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		36 Kegiatan	12.650.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	0 Kegiatan	1.550.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitas HUT RI 3. Fasilitas Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP)	0 Kegiatan	1.550.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	29 Kegiatan	11.100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.	29 Kegiatan	11.100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Muara Muntai	95 Persen	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	1.100.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Muara Muntai	20 Kegiatan	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		20 Kegiatan	1.100.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	150 Orang	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Orang	100.000.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-



7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	775.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	1.000.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	25 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		25 Persen	-
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-



7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*****)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Muara Muntai	10 SPM	-	APBD Kutai Kartanegara	10 SPM	-
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Muara Muntai	100 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara	100 Persen	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	100 Persen	-
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-



7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Muara Muntai	95 Persen	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara	95 Persen	915.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Muara Muntai	0 Desa	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara	0 Desa	915.000.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	65.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	1 Kegiatan	306.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	55.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-



7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	2 Kegiatan	214.520.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK	2 Kegiatan	200.520.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	30.000.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Muara Muntai.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Muntai ini juga masih terdapat kurang - kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Muara Muntai, 05 Agustus 2024

Camat Muara Muntai

MULYADI, SE., M.Si
NIP. 19700205 200012 1 003